

**GREBEG SUDIRO: MENGOLAH WARISAN KERAGAMAN
ETNIK KULTUR CINA-JAWA UNTUK MODERASI SUKU,
RAS, DAN AGAMA DI SURAKARTA**

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN TERAPAN



Ketua Peneliti
Dr. Bondet Wrahatnala, S.Sos., M.Sn.
NIP 197912022006041001

Anggota
Satriana Didiek Isnanta, S.Sn., M.Sn.
NIP 197212212005011002

Dibiayai DIPA ISI Surakarta No: SP DIPA-023.17.2.677542/2022
Tanggal 17 November 2021, berdasarkan SK Rektor No.
326/IT6.1/PT.01.03/2022
Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,
Sesuai dengan surat perjanjian pelaksanaan penelitian terapan
No. 741/IT6.2/PT.01.03/2022

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
November, 2022

ABSTRAK

Penelitian tentang festival Grebeg Sudiro di Surakarta bertujuan untuk menghasilkan model festival yang berupaya mengkomunikasikan nilai-nilai harmonisasi dari fakta-fakta keberagaman suku, ras, dan agama yang tercermin pada bentuk-bentuk ekspresi simbolik dan estetik. Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dalam upaya untuk menggali dan menjelaskan tentang gejala-gejala moderasi keberagaman dalam Festival Grebeg Sudiro, serta makna dari peristiwa tersebut bagi masyarakat Cina-Jawa di Surakarta. Hasil penelitian ini berisi kajian berupa (1) Bentuk dan Isi Festival Grebeg Sudira, (2) Setting Pluralisme dan Kebhinekaan dalam Festival Grebeg Sudira, (3) Setting Pluralisme dan Kebhinekaan dalam Kebudayaan Masyarakat Surakarta, (4) Setting Pluralisme dan Kebhinekaan dalam Dinamika Politik di Surakarta, dan (5) Modalitas Setting Kebudayaan di Surakarta. Hasil dari kajian tersebut mengantarkan pada rekomendasi desain model festival moderasi yang berjudul Festival Moderasi *Mad-Sinamadan Daya-Dinayan*.

Kata Kunci : Grebeg Sudiro, Moderasi Keberagaman, Festival, Harmonisasi Sosial

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penelitian terapan yang berjudul “Grebeg Sudiro: Mengolah Warisan Keragaman Etnik Kultur Cina-Jawa untuk Moderasi Suku, Ras, dan Agama di Surakarta” dapat diselesaikan dan dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan berkat bantuan bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang turut terlibat, sehingga pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut terlibat dalam mendukung dan membantu pelaksanaan penelitian ini.

Kepada lembaga LP2MP3M ISI Surakarta yang senantiasa mendorong dan memfasilitasi dosen untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada ketua dan anggota Pusat Studi Seni, Agama, dan Keberagaman ISI Surakarta sebagai wadah untuk berfikir, berkarya, dan bekerjasama di dalam bidang praktik moderasi beragama melalui praktik karya dan pengkajian seni. Kepada Fakultas Seni Pertunjukan dan pengelola Jurusan Etnomusikologi ISI Surakarta yang telah mendukung dan mendorong terselenggaranya kegiatan penelitian ini sebagai bentuk peningkatan mutu dan kinerja dosen dalam melaksanakan Tridarma.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih memungkinkan untuk dikembangkan lebih jauh, baik dalam bentuk penelitian lanjutan maupun terapan karya dan *event* seni pertunjukan. Besar harapan kami agar luaran dari hasil penelitian ini dapat sesegera mungkin untuk direalisasikan dan diaplikasikan dalam bentuk program pengabdian kepada masyarakat berbasis karya dan produksi *event* seni pertunjukan moderasi.

Surakarta, 9 November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul Latar Belakang	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB I. Pendahuluan	1
BAB II. Tinjauan Pustaka	4
BAB III. Metode Penelitian	7
BAB IV. Analisis Hasil	10
BAB V. Luaran Penelitian	22
Daftar Acuan	26
Lampiran-lampiran	28

BAB I. PENDAHULUAN

Sejak awal berdirinya, Indonesia merupakan sebuah bangsa yang terbentuk dari perjuangan mengelola sejarah dan ideologi yang berangkat dari keberagaman suku, ras, dan agama. Sejarah berlangsungnya Sumpah pemuda, semboyan Bhineka Tunggal Ika, serta Ideologi Pancasila menjadi bukti nyata bahwa Indonesia merupakan negara yang dibangun melalui dialog keberagaman, serta menjunjung tinggi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran tentang potensi keberagaman sebagai kekuatan membangun bangsa sebenarnya telah disadari jauh hari oleh leluhur masyarakat Nusantara. Bahkan kesadaran tentang hal tersebut pun menjadi salah satu materi yang diolah secara politik tata pemerintahan. Kebesaran kerajaan Singosari, Majapahit, Sriwijaya, Mataram, Kraton Kasunanan Surakarta dan termasuk keberhasilan mendirikan negara Indonesia adalah tidak lepas dari keberhasilan mengelola potensi keberagaman menjadi energi kebersamaan di tengah masyarakat.

Hanya saja dalam perkembangannya, kepedulian dan kemampuan untuk mengelola keragaman sebagai energi pembangunan bangsa seakan-akan memudar. Bahkan pada periode tertentu beberapa otoritarisme ‘politik’ juga ada yang berupaya mencerabutnya karena kecurigaan dan ketakutan tentang potensi keragaman yang memperlebar perbedaan. Dapat disebutkan beberapa isu SARA dalam dekade terakhir justru tampak semakin menguat di Indonesia. Fenomena ini pada akhirnya menjadi permasalahan kebangsaan yang tidak jarang justru melahirkan problem perpecahan di masyarakat sehingga dengan sendirinya mengingkari konsep dasar Indonesia sebagai negara kesatuan (Arafah, 2020: 58).

Problem-problem yang mengarah pada resiko perpecahan kehidupan bangsa dan bernegara semakin tampak tajam dipermukaan ketika diekspos secara berlebihan melalui media massa seiring dengan kemudahan teknologi yang semakin memajukan akses informasi di tengah masyarakat. Hal tersebut membuat seakan-akan problem yang sesungguhnya tampil sebagai riak kecil dalam perjalanan kebangsaan tampak sebagai sesuatu yang besar dan pantas mencerminkan pandangan seluruh masyarakat Indonesia. Bukti kongkret misalnya, informasi yang

tersebar di berbagai media menunjukkan adanya praktik-praktik radikalisme terstruktur, sistematis, dan masif dari segelintir kalangan yang dianggap mengancam dan membahayakan keamanan, serta berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya di kehidupan masyarakat Indonesia justru lebih banyak sebagai situasi hidup harmonis secara berdampingan, meskipun berbeda dalam hal suku, ras, dan agama. Pengetahuan dan praktik-praktik semacam itulah yang mestinya ditelusuri, digali, didalami, dan bahkan dikabarkan secara lebih luas sebagai modal kultural bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman perpecahan yang bisa berpotensi membesarkan tindakan-tindakan radikalisme yang selama ini dikhawatirkan oleh berbagai pihak.

Berbagai cara pada dasarnya bisa digunakan untuk menelusuri, menggali, mendalami dan menyebarluaskan sisi positif dari fakta harmonisasi keragaman yang senyatanya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Salah satu yang bisa ditempuh adalah melalui penyelenggaraan festival. Konsep festival memiliki kekuatan sebagai wadah untuk mengelola keberagaman yang disatukan dalam bingkai ruang dan waktu untuk dipadukan dan dikabarkan secara masal. Festival sebagai sebuah peristiwa kebudayaan mampu memfasilitasi penataan ulang struktur dengan bingkai dan proses yang baru secara berkelanjutan, sehingga dapat memperkuat rasa kebersamaan yang dibangun melalui bentuk ekspresi keberagaman dari berbagai unsur masyarakat yang terlibat di dalamnya. Berkaitan dengan hal itu, Stoeltje (1992: 270) menjelaskan bahwa festival pada dasarnya terdiri dari berbagai macam bentuk-bentuk simbolik yang membawa banyak arti dengan latar belakang, tujuan, serta pemaknaan yang dihadirkan oleh setiap individu yang terlibat di dalamnya, namun dalam wadah tema besar yang membingkai peristiwa tersebut. Oleh karena itu, berbagai macam bentuk ekspresi seni, tindakan, dan berbagai macam aktivitas keterlibatan manusia di dalamnya merupakan bentuk-bentuk komunikasi simbolik yang perlu diketahui maknanya secara lebih luas, jauh, dan mendalam.

Berpijak pada pengertian serta sifat dasar festival seperti yang dikemukakan di atas, maka bentuk festival yang dirancang dan diusulkan dalam kegiatan ini

berupaya untuk mengkomunikasikan nilai-nilai harmonisasi dari fakta-fakta keberagaman suku, ras, dan agama yang tercermin pada bentuk-bentuk ekspresi simbolik dan estetik. Melalui bentuk penyelenggaraan festival mencoba mendorong kesadaran mendasar tentang kerukunan hidup yang berlandaskan kesatuan dalam kenyataan kehidupan masyarakat yang memang memiliki perbedaan. Perbedaan sesungguhnya bisa menjadi potensi dan sumber daya apabila mampu mengelolanya untuk menjadi jalinan energi kekuatan bersama dalam mencapai cita-cita hidup berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara.



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Clifford Geertz (1973) dalam perspektif antropologinya menjelaskan bahwa simbol merupakan bagian ciri khas dalam suatu agama (religion). Agama merupakan sistem simbol yang berperan sebagai pedoman hidup manusia, serta dengan sangat kuat mempengaruhi atau membentuk, meresap, dan melekat pada jiwa manusia. Agama menyediakan konsepsi atau pemahaman atas simbol-simbol sebagai ajaran mengenai tatanan atau hukum-hukum eksistensi kehidupan manusia. Y. Sumandiyo Hadi (2006) juga menjelaskan bahwa setidaknya ada empat sistem simbol yang saling terintegrasi membentuk ideologi dalam suatu agama, yaitu sistem kognitif, simbol moral yang berkaitan hukum dan norma-norma, simbol ekspresif yang berkaitan dengan pola-pola ekspresi keagamaan, dan simbol konstitutif yang berkaitan dengan kepercayaan dan pola penyembahan dalam agama. Oleh karena itu, simbol sebagai unsur fundamental dalam agama tidak bisa dielakkan.

Simbol-simbol (baik konsep maupun prakteknya) keagamaan juga kerap menimbulkan polemik hingga perilaku intoleransi di dalam kehidupan manusia, terutama karena adanya perbedaan keyakinan di antara individu atau masyarakat atas suatu paham yang diajarkan dari simbol-simbol agama. Alisa Wahid (2015) menjelaskan bahwa pada tahun 2014 berbagai bentuk tindakan pelanggaran dan intoleransi yang juga melibatkan aktor negara telah terjadi di Indonesia. Di antaranya terdapat 17 peristiwa penyegelan / pelarangan / penghambatan rumah ibadah, 14 peristiwa kriminalisasi atas dasar agama, 12 peristiwa diskriminasi atas dasar agama, dan 12 peristiwa pelarangan dan penghentian kegiatan keagamaan. Di dalam situasi dan kondisi seperti itu, “kelompok-kelompok minoritas terus dipinggirkan hak konstitusionalnya, bahkan seringkali dikriminalisasi dengan pasal penghasutan kebencian atau penistaan agama”.

Istiqomah dan Widiyanto (2019) dalam artikelnya menjelaskan mengenai bentuk-bentuk resolusi konflik berbasis budaya yang dibangun untuk mencegah timbulnya konflik komunal di antara warga etnis Tionghoa dan etnis Jawa, antara lain melalui proses perkawinan silang, membangun prinsip “*kumpul ra kumpul*

mangan, mengelaborasi motif dan ukiran Cina dan Jawa dalam suatu bangunan, serta membangun partisipasi multi etnis dalam berbagai upacara adat istiadat tradisi dan keagamaan. Hakim (2020) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa kesadaran kolektif masyarakat Sudiroprajan yang berlandaskan pada pengalaman sejarah dan kebutuhan hidup untuk berinteraksi bersama telah mampu menegosiasikan upacara Grebeg Sudiro sebagai simbol keberagaman yang diterima dan diapresiasi bersama oleh masyarakat kebudayaan Jawa dan Tionghoa.

Sebuah terbitan buku kumpulan esai-esai terpisah dari karya Leo Suryadinata (1984) menunjukkan adanya kesinambungan dan keterkaitan antara tulisan satu dengan yang lainnya. Kumpulan esai ini menyoroti tentang masalah minoritas China di Indonesia dan aspek-aspek dari sudut pandang politik yang berkenaan dengan masalah konsepsi, peran ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Masalah minoritas dalam hal ini bukan semata-mata masalah golongan minoritas Cina di Indonesia saja, tetapi juga merupakan masalah nasional dan internasional yang berdampak bagi Indonesia. Gelombang-gelombang aliran dan isme di kalangan minoritas China sudah dimulai sejak masa Hindia Belanda yang diungkapkan sebagai bentuk gerakan untuk menuntut persamaan hak dengan golongan Eropa, hingga kemudian turut berpengaruh terhadap gerakan perjuangan kemerdekaan di Indonesia, walaupun dilatarbelakangi konsepsi dan ideologi yang relatif berbeda dengan penduduk pribumi. Pada masa pasca-kolonial, hubungan antara pribumi dan minoritas China terlihat tidak siap menghadapi satu sama lain hingga timbul perpecahan dan konflik di antara keduanya. Berdasarkan pengalaman yang telah terjadi di masa lalu, Indonesia sebagai sebuah bangsa yang terbentuk dari kebhinekaan harusnya memiliki kekuatan untuk mengelola dan memecahkan masalah minoritas di Indonesia, baik terkait ras, suku, agama, dan lain sebagainya.

Sebuah makalah yang ditulis oleh Ammar Muhammad (2020) menekankan tentang pentingnya menjaga kearifan lokal untuk dijadikan sebagai pegangan hidup masyarakat. Kearifan lokal sebagai tradisi dan kebudayaan dalam suatu masyarakat Indonesia turut berperan dalam membentuk suatu kesatuan dalam keragaman, seperti halnya dalam upacara Grebeg Sudiro yang merupakan akulturasi budaya Jawa dan Cina. Kehadirannya sebagai bentuk upacara dan ritual perayaan turut

berperan dalam menjaga kelestarian kerukunan antar etnis yang terjadi di Kampung Sudiroprajan. Grebeg Sudiro berisi sejumlah kegiatan, seperti Upacara Umbul Mantram, Karnaval Budaya, Lomba Cipta Karya Lentera, Hiasan Perahu Wisata Sungai Pepe, Bazar, Sudiroprajan dan Potensi yang di tutup dengan Perayaan Kembang Api.



BAB III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dalam upaya untuk menggali dan menjelaskan tentang gejala-gejala moderasi keberagaman dalam Festival Grebeg Sudiro, serta makna dari peristiwa tersebut bagi masyarakat Cina-Jawa di Surakarta. Tujuan dari penggunaan pendekatan fenomenologi ini adalah mendeskripsikan pengalaman kehidupan manusia tentang suatu fenomena tertentu seperti yang dijelaskan oleh para partisipan. Deskripsi ini berujung pada intisari pengalaman partisipan yang telah mengalami semua fenomena tersebut (Creswell, 2016: 18-19).

Studi ini menyorot pada tiga tujuan pokok, antara lain: (1) menjelaskan bentuk-bentuk praktik moderasi keberagaman berdasarkan pengetahuan dan persepsi masyarakat dalam mengalami peristiwa Grebeg Sudiro, (2) memahami festival Grebeg Sudiro sebagai momentum perayaan keberagaman melalui penyelidikan *setting* pluralism kebudayaan dan dinamika politik yang terjadi di Surakarta, dan (3) menjelaskan modalitas kebudayaan leluhur masyarakat Surakarta yang sebenarnya sudah melakukan pengelolaan dengan baik terhadap keberagaman.

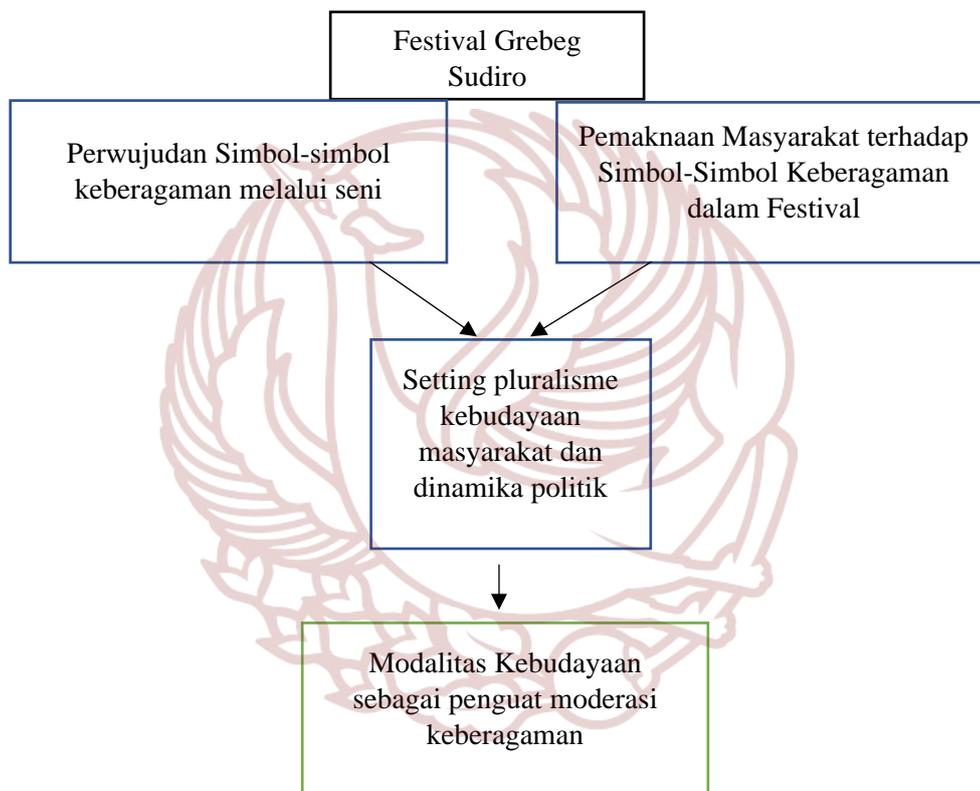
Penelitian ini menempatkan peristiwa seni dan festival kebudayaan sebagai fokus kajian yang diyakini mampu mewartakan harmonisasi keberagaman yang terjadi, karena Festival Grebeg Sudiro menggunakan seni dan festival sebagai media aktualisasi untuk mempresentasikan harmonisasi peleburan keberagaman. Hal itu berkaitan erat dengan sifat seni yang umumnya menjadi bagian inheren dari peristiwa sosial-kolektif, sehingga mampu mengukuhkan hubungan batin sekaligus memperkuat kohesi sosial (Sugiharto, 2017: 30). Seni adalah bahasa yang berupa segala macam bentuk simbol dan lambang (kata, gerak, gambar, suara, dan isyarat) yang membuka kesempatan untuk menjelaskan ide-ide dan gagasan kepada khalayak atau audien, bahkan sebagai 'dokumen' penyimpan pesan untuk generasi penerus bangsa. Seni dengan sifat dasar artistiknya seringkali digunakan sebagai media yang strategis untuk membangkitkan kesadaran dan perasaan dengan tujuan tertentu (van Peursen, 1988: 143).

Perbedaan tampak eksis tanpa meniadakan unsur-unsur yang berlainan, namun dipadukan secara harmonis dalam bentuk bingkai festival yang terorganisir secara sosial dan kultural. Festival dalam hal ini mampu memfasilitasi penataan ulang struktur dengan bingkai dan proses yang baru secara berkelanjutan, sehingga dapat memperkuat rasa kebersamaan yang dibangun melalui bentuk ekspresi keberagaman dari berbagai unsur masyarakat yang terlibat di dalamnya. Berkaitan dengan hal itu, Stoeltje (1992: 270) menjelaskan bahwa festival pada dasarnya terdiri dari berbagai macam bentuk-bentuk simbolik yang membawa banyak arti dengan latar belakang, tujuan, serta pemaknaan yang dihadirkan oleh setiap individu yang terlibat di dalamnya, namun dalam wadah tema besar yang membingkai peristiwa tersebut. Oleh karena itu, berbagai macam bentuk ekspresi seni, tindakan, dan berbagai macam aktivitas keterlibatan manusia di dalamnya merupakan bentuk-bentuk komunikasi simbolik yang perlu digali dan diketahui maknanya secara lebih jauh dan mendalam.

Penelitian akan dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain tahap pengumpulan data, analisis, serta penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Pengumpulan data akan dilakukan melalui beberapa cara, antara lain: (1) pengumpulan arsip berupa data-data fisik maupun virtual dalam bentuk tulisan, video-video, dan foto yang tersebar di berbagai *platform* media internet, (2) wawancara dengan beberapa informan terpilih yang memiliki enkulturasi penuh terhadap pelaksanaan Festival Grebeg Sudiro dan enkulturasi penuh terhadap situasi dinamika politik di Surakarta, (3) melakukan beberapa sesi *Focus Group Discussion* dengan beberapa pihak dari unsur akademisi, pemerintahan, pengelola event, sejarawan, sosiolog, antropolog, pengamat politik, dan seniman di Surakarta, serta (4) pengumpulan data melalui studi kepustakaan tentang sejarah dan strategi kebudayaan masyarakat Cina-Jawa di Surakarta.

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian akan dipilih secara kritis untuk ditelaah dan dianalisis sesuai dengan ketiga sasaran pokok penelitian. Data-data mengenai bentuk-bentuk praktik moderasi keberagaman dalam Festival Grebeg Sudiro akan diungkap dan dijelaskan maknanya berdasarkan realitas simbol yang ditunjukkan, serta pemaknaan langsung dari masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Setelah itu, data-data dari penjelasan tersebut akan dimanfaatkan untuk memahami tentang memori kultural masyarakat Cina-Jawa Surakarta yang sebenarnya sudah terbangun sejak lama dengan keberagaman. Keterkaitan Festival Grebeg Sudiro dengan setting kultural dalam masyarakat sejak masa lampau akan memperjelas adanya modalitas kebudayaan dari leluhur masyarakat Surakarta yang mengakar kuat hingga saat ini.



BAB IV. ANALISIS HASIL

A. Bentuk dan Isi Festival Grebeg Sudiro

Gambaran harmonisasi yang berangkat dari fakta kesadaran tentang perbedaan etnis yang ada di Indonesia, salah satunya dapat dijumpai dalam perayaan Grebeg Sudiro. Grebeg Sudiro merupakan festival budaya yang dikembangkan oleh masyarakat keturunan Tionghoa di Kelurahan Sudioprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Istilah “grebeg” merujuk pada arti festival budaya atau sebuah perayaan besar, sementara kata “sudiro” adalah kependekan dari sebutan nama kelurahan lokasi tempat berlangsungnya perayaan tersebut yaitu, kelurahan Sudioprajan. Dengan demikian secara harafiah, Grebeg Sudiro memiliki arti perayaan atau festival besar yang dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan Sudioprajan.

Grebeg Sudiro sendiri sesungguhnya bentuk tradisi baru yang dibuat dan dilakukan sejak tahun 2008 oleh masyarakat Tionghoa di kampung Sudioprajan. Awal mulanya festival budaya tersebut diperuntukan sebagai wujud perayaan hari ulang tahun berdirinya Pasar Gedhe. Namun kegiatan ini berlanjut menjadi perayaan tahunan untuk menyongsong datangnya tahun baru China atau Imlek. Ketika acara Grebeg Sudiro menjadi besar sebagai festival budaya pra Imlek, maka peserta grebeg pun tidak hanya terbatas diikuti oleh masyarakat di kelurahan Sudioprajan. Peserta inti festival tersebut semakin berkembang terutama diadakan oleh masyarakat-masyarakat Tionghoa di Surakarta secara bersama-sama, di mana mereka selain di Sudioprajan juga menempati daerah sekelilingnya seperti kelurahan Coyudan, Pasar Legi, dan Balong. Perlu diketahui jika daerah Sudioprajan, Coyudan, Pasar Legi, dan Balong ini memang sejak dahulu dikenal sebagai daerah Pecinan atau lokasi pemukiman mayoritas masyarakat Tionghoa di Surakarta. Pemukiman tersebut tergolong tua karena jutra sudah ada sebelum Istana Kasunanan Surakarta berdiri di tahun 1745 (Adi dkk., 2019:2).

Kemunculan festival Grebeg Sudiro di Surakarta sesungguhnya juga wujud ekspresi kebudayaan komunitas masyarakat Tionghoa yang sempat dibatasi pada masa Orde Baru seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomer 14 tahun 1967

tentang pembatasan ekspresi budaya dan kepercayaan asal China. Semenjak reformasi bergulir di tahun 1998 ketika peraturan tersebut dicabut, maka telah memberi keleluasaan kembali bagi masyarakat Tionghoa termasuk di Sudiroprajan untuk mengekspresikan simbol-simbol kebudayaan China yang salah satunya perayaan Imlek secara terbuka.

B. Setting Pluralisme dan Kebhinekaan dalam Festival Grebeg Sudira

Menjadi menarik ketika perayaan Grebeg Sudiro sejak awal pelaksanaan di tahun 2008, dibangun dari spirit lokal masyarakat Sudiroprajan. Spirit tersebut adalah tentang kesadaran prularisme etnis dan pentingnya persatuan antar suku, ras, golongan, bahkan agama. Kesadaran ini bagi masyarakat setempat memang bukan sesuatu yang baru, tapi telah berkembang sejak berabad-abad yang lalu seumur mereka menempati daerah Sudiroprajan. Sudah sejak nenek moyang, mereka yang Tionghoa dibiasakan diri untuk berbaur dengan masyarakat etnis Jawa atau lainnya yang ada disekeliling mereka. Percampuran ini tidak hanya dalam tataran pergaulan sosial saja, tetapi lebih jauh dalam hal silang perkawinan, kreativitas penciptaan produk kuliner, seni dan kebudayaan. Dengan demikian menjadi wajar apabila banyak ditemukan masyarakat Tionghoa di lingkungan Pecinan seperti di Sudiroprajan ini ternyata memiliki pasangan Jawa, melahirkan produk kuliner khas campuran cita rasa etnis Tionghoa dan Jawa seperti ampyang, gembukan, dan onde-onde, belajar menari dan menabuh gamelan Jawa untuk orang Tionghoa dan belajar memainkan Barongsai dan Liong bagi orang Jawa, saling mengenal Jamu Jawa sekaligus juga Sin She Tionghoa, serta melestarikan tradisi *slametan* yang notabene adalah Jawa namun berbalur nuansa budaya China. Sayangnya semangat persatuan antar etnis sebagaimana tersebut sempat harus mereka sebuyikan di muka publik akibat peraturan masa Orde Baru yang membatasi. Keleluasaan ekspresi budaya Tionghoa semenjak era Reformasi telah menumbuhkan semangat masyarakat Tionghoa khususnya di Sudiroprajan untuk kembali berani mengekspresikan jiwa pluralismenya secara terbuka melalui perayaan Grebeg Sudiro.

Pola kesadaran pluralisme yang sejak lama ada dalam mentalitas masyarakat Sudiroprajan pada akhirnya dituangkan secara leluasa dalam bentuk

festival Grebeg Sudiro. Simbol-simbol pembauran etnis ditampilkan dalam berbagai ekspresi seni (kata, gerak, musik, dan aneka rupa visual), prosesi ritual, kuliner, dan ekspresi-ekspresi sosial. Melalui seni tergambar jelas bagaimana fakta keragaman yang melingkupi masyarakat Sudiroprajan dikelola menjadi wujud ekspresi estetik yang campuran. Hal ini seperti terlihat pada visualisasi gunung (tumpeng) Jawa yang dibentuk dari isian kue keranjang khas Tionghoa. Konten pertunjukan sebagai isian festival pun menghadirkan ragam kesenian seperti barongsai, liong, reog, topeng ireng, dan kesenian-kesenian lain yang berkembang di seputar Solo Raya. Keriuhan auditif dari beragam pertunjukan kesenian yang dihadirkan di lokasi festival pada akhirnya juga menjadi penanda khas denyut kehidupan etnik di Surakarta yang plural namun tetap mau saling berdampingan. Semua itu seperti dengan hadirnya beragam suara-suara musik dengan identitas etnis masing-masing seperti misalnya tambur, lin-lin, jik-jik dari etnik China, suara gamelan dari etnik Jawa, dan/atau suara identitas alat musik dari kultur yang lain yang terlibat dalam festival. Contoh-contoh tersebut sesungguhnya hanya sebagian saja yang bisa disebutkan dari kenyataan yang terlihat di arena festival. Walaupun demikian, dengan contoh yang sederhana tersebut paling tidak sudah bisa menggambarkan betapa masyarakat Sudiroprajan sangat menjunjung tinggi mentalitas kebersamaan dalam fakta-fakta keragaman.

Sikap dan perilaku budaya masyarakat Sudiroprajan mencerminkan adanya model mental pluralisme yang menunjukkan ketahanan hidup mereka di antara keberagaman. Masyarakat Sudiroprajan telah memiliki arah orientasi dalam menanggapi makna-makna relasi rasnya dengan ras lainnya yang berbasis pada kecakapan moderasi. Pengalaman hidup pada budaya masyarakat Sudiroprajan dianggap mampu mewakili variabel mikro tentang praktik moderasi yang berpotensi dikembangkan sebagai sebuah peubah karakter mental makro yang dapat mempengaruhi variabel luas dalam upaya mewujudkan kehidupan moderasi keragaman ras, suku, dan agama masyarakat Indonesia (Lutan, 2001:6-7).

C. Setting Pluralisme dan Kebhinekaan dalam Kebudayaan Masyarakat Surakarta

Pluralisme bagi masyarakat Surakarta bukan suatu yang baru. Konsep pluralisme telah jauh dikenal masyarakat Surakarta bahkan sejak era-era kerajaan sebelum Karaton Surakarta yang secara historis mencikalbakali pendiriannya. Seperti fakta Perjanjian Giyanti atau Palihan Nagari (1755) yang menyebabkan terpisahnya Surakarta dan Yogyakarta, ternyata pun tidak lepas dari campur tangan Kompeni (Nurhadiantomo, 2004:87). Lepas dari kepentingan politik dari Kompeni yang berusaha mencampuri urusan bangsa Jawa untuk kepentingannya, posisi Kompeni yang notabene sebagai bangsa lain (Belanda) dan dipercaya oleh masyarakat Jawa sebagai mediator konflik politik kerajaan adalah gambaran mentalitas masyarakat Surakarta yang telah sadar akan pluralisme. Kesadaran akan pluralisme mendorong masyarakat Surakarta mampu menerima fakta-fakta keberagaman dan kesamaan hak di antara suku, ras, dan agama yang berbeda-beda.

Mentalitas yang pluralis pada akhirnya juga tergambar dalam realitas sosial masyarakat Surakarta. Konsep tata kota Surakarta mencerminkan sifat pluralistis yang teramat kuat. Ditunjukkan dengan pengelompokan hunian untuk mengakomodir keragaman kelompok etnis yang hidup dan bertempat tinggal secara turun temurun di Surakarta. Perlu diketahui Surakarta pada awal abad XX sudah dikenal dengan keragaman kelompok etnis yang meliputi: Eropa, Cina, Arab, dan Pribumi Jawa (Kartodirdjo, 1990:73-74). Pada waktu hunian untuk masing-masing kelompok etnis sengaja dilokalisir. Masyarakat Eropa dan keturunannya menempati wilayah sekitar Benteng Vastenburg yang dikenal sebagai Loji Wetan, Stabelan dan Kestalan serta Villa Park. Hunian orang Cina ditempatkan di sekitar Pasar Gede yang kemudian dikenal sebagai kampung Balong (Sudiroprajan), sementara kelompok etnis Arab ditempatkan di sekitar Pasar Kliwon. Strategi penempatan untuk para penduduk pribumi Jawa tersebar di seluruh kota yang dikelompokan berdasarkan kelas sosial, profesi, dan karakteristik kampung. Hunian untuk bangsawan dinamakan dengan nama-nama tokoh terkemuka karaton yang bersinggah dan/atau bertempat tinggal di kampung tersebut, misalnya Ngadijayan, Makubumen, Joyosuman, Suryabratan, dan yang

lain. Untuk dasar penamaan kampung yang berangkat dari profesi misalnya: Coyudan, Mangkuyudan, Kasatrian, Tamtaman, Sayangan, Gemblegan, Sellembaran, Jayengan, Carikan, Jagalan, Wirengan, Kemlayan (Darsiti Suratman, 2002:3).

Realitas sosial yang dilokalisir berdasarkan kelompok etnis sebenarnya bertolak belakang dengan realitas interaksi sosial antar kelompok etnis yang berjalan wajar, damai dan tidak ada masalah. Dapat buktikan dengan proses interaksi orang Cina dan Jawa yang telah berlangsung berabad-abad lewat proses perdagangan, perkawinan, dan pembauran sosial (Carey, 1986: 15). Proses tersebut telah melahirkan bentuk-bentuk akulturasi budaya yang khas dan beraneka ragam, meliputi kuliner, karya seni, bahasa, upacara adat, arsitektur, dan beragam unsur-unsur kebudayaan yang lainnya. Proses pembauran tersebut dapat dilihat dari keanekaragaman kuliner Kota Solo seperti kue Onde-onde, kue Ajang Gelut, Timlo, dan kue Ampyang. Praktik-praktik kesenian yang ditampilkan dengan melibatkan partisipasi dan pembauran antar kelompok etnis Jawa-Cina, misalnya dalam kesenian Barongsai (Tionghoa), Liong (Tionghoa), Wayang Wong (Jawa), Batik (Jawa), Keris (Jawa), Gamelan (Jawa).

D. Setting Pluralisme dan Kebhinekaan dalam Dinamika Politik di Surakarta

Selama ini kehidupan sosial yang terjalin dan terjadi antara masyarakat Jawa dan Cina tidak selalu berarti berlangsung secara harmonis. Tidak jarang konflik-konflik dari yang berskala kecil hingga besar turut mewarnai dinamika kehidupan sosial antar kelompok etnis di kota Surakarta, khususnya benturan antara penduduk lokal Jawa dengan penduduk keturunan Tionghoa. Konflik tersebut umumnya terjadi karena pengaruh politik di masa pemerintah Hindia Belanda, konflik antar kelompok partai, hingga kebijakan pemerintah di masa orde baru yang seringkali membangun narasi-narasi yang mencitrakan secara negatif terhadap keberadaan masyarakat keturunan Tionghoa. Akibatnya, perpecahan dalam bentuk-bentuk kekerasan, kerusuhan, penjarahan dan pembakaran toko, hingga

pembunuhan turut menjadi tinta hitam dalam cerita sejarah kelam masyarakat Tionghoa di Surakarta.

Kerusuhan rasial anti cina di Surakarta sudah dimulai sejak tahun 1740 ketika VOC di Batavia merasa terancam atas kemajuan perdagangan orang-orang China, akibatnya ribuan orang china dibantai, ratusan rumah dibakar, dan narasi kebencian kepada kaum china mulai dibangun (Lombard, 2005: 137-144). Sistem hukum Hindia Belanda telah memisahkan penduduk Tionghoa dan pribumi ke dalam kelompok-kelompok dan kelas-kelas yang berbeda. Orang Tionghoa bersama orang Arab, India, dan setelah 1930 juga orang Jepang termasuk kategori *Vreemde Oosterlingen* (orang Timur Asing). Kategori golongan ini setingkat lebih tinggi dari orang Jawa sebagai pribumi yang disebut *Inlanders*. Sementara golongan tertinggi di atas *Vreemde Oosterlingen* dan *Inlanders* adalah *Europeanen* yang ditempati masyarakat Belanda atau Indo-Belanda (*tiyang Landi Indho*). Tiga sistem sosial yang dibentuk Hindia Belanda tersebut masing-masing tunduk pada sistem hukum khusus yang berbeda-beda. Perbedaan ini menyebabkan semakin lebarnya jurang pemisah dalam realitas sosial terutama antara Cina dan Jawa (Koentjaraningrat, 1994:75).

Semenjak itu narasi-narasi anti china hampir selalu dibesar-besarkan hingga kemudian mampu mendoktrinasi alam pikir penduduk lokal untuk turut membenci China. Persoalan-persoalan yang berlatarbelakang individu hampir selalu dibesarkan menjadi isu rasial, akibatnya persoalan yang menyangkut individu yang berlatarbelakang kelompok etnis china menjadi sangat sensitif. Isu-isu tersebut dapat digambarkan dalam peristiwa tahun 1890 ketika Pangeran Diponegoro melarang Prajuritnya untuk berhubungan dengan orang-orang china gegara tindakan manipulatif pajak gerbang tol dan sewa tanah yang dilakukan oleh segelintir orang china, hingga kemudian memicu amarah penduduk lokal untuk melakukan pembantaian terhadap orang-orang china di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo (Carey, 1986: 65-83). Pasca perang jawa hingga akhir abad XIX banyak orang-orang china menjadi objek sasaran kebencian melalui perampokan dan pengancaman akibat kesenjangan ekonomi.

Kesenjangan hubungan antara China dan Jawa di Surakarta, sejak awal abad XX sangat rawan konflik bagaikan bom waktu yang bisa meledak kapan saja menjadi kerusuhan sosial berbau rasial, meskipun faktor pemicunya relatif kecil (Rustopo, 2006: 136-137). Pada tahun 1980 misalnya, hanya karena kasus tabrakan lalu lintas yang diikuti pemukulan oleh seorang pemuda china terhadap pelajar Jawa, hal ini memicu kerusuhan besar dalam bentuk pembakaran dan penjarahan toko-toko China. Kerusuhan tersebut meluas hingga ke kota-kota lain, seperti Klaten, Purwodadi, dan Semarang (Siegel, 1986: 232-235). Kasus-kasus dengan pola yang serupa juga terjadi pada kerusuhan Mei 1998 saat menjelang bergulirnya reformasi. Jauh sebelum itu, kebebasan ekspresi budaya dan kepercayaan masyarakat Tionghoa juga sempat dibatasi pada masa Orde Baru seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomer 14 tahun 1967 tentang pembatasan ekspresi budaya dan kepercayaan asal China.

Semenjak reformasi bergulir di tahun 1998 ketika peraturan tersebut dicabut, maka telah memberi keleluasaan kembali bagi masyarakat Tionghoa termasuk di Sudiroprajan untuk mengekspresikan kembali simbol-simbol kebudayaan China termasuk merayakan Imlek secara terbuka. Perayaan Grebeg Sudiro yang bergulir sejak tahun 2008 turut menggelorakan kembali spirit lokal masyarakat Sudiroprajan tentang kesadaran pluralisme dan kebhinekaan yang telah dirawat selama berabad-abad. Keleluasaan ekspresi budaya Tionghoa semenjak era Reformasi telah menumbuhkan semangat masyarakat Tionghoa khususnya di Sudiroprajan untuk mengekspresikan kembali spirit pluralisme dan kebhinekaannya dalam bentuk pembauran sosial secara terbuka melalui perayaan Grebeg Sudiro.

E. Modalitas Setting Kebudayaan di Surakarta

Solo menasbihkan diri sebagai kota *The Spirit of Java* maksudnya sebagai kota yang mewarisi ruh kebudayaan Jawa. Hal ini tidak lepas dari alur kesejarahan dalam pembentukan masyarakat di Surakarta. Surakarta merupakan daerah pusat perkembangan kebudayaan Jawa yang ditandai dengan berdirinya Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran. Dalam posisi tersebut Surakarta tergolong sebagai Nagariung. Nagariung adalah pusat pemerintahan Jawa dan

perkembangan kebudayaan. Sebagai daerah pusat menjadi wajar apabila Surakarta di masa lalu menjadi daerah pertemuan etnik-etnik selain Jawa dalam kepentingannya masing-masing baik kepentingan secara politis maupun ekonomi. Hal ini menjadikan Surakarta terbiasa dengan perbedaan membuat masyarakatnya cenderung lebih toleran terhadap tradisi dan kebudayaan etnik lain. Sebagaimana ditegaskan Koentjaraningrat, bahwa memang benar di daerah ini toleransi terhadap tradisi-tradisi kebudayaan lain adalah yang paling besar, dan karena itu kecenderungan untuk adanya sinkretisme juga sangat besar (Koentjaraningrat, 1994:224).

Setting kultural masyarakat Surakarta di masa lalu memperlihatkan bahwa di kota ini tinggal beberapa etnis yaitu Jawa sebagai mayoritas, Tionghoa, masyarakat Eropa, Indo Eropa, Arab, India, dan pada masa perang II juga menjadi tempat tinggal bagi masyarakat Jepang. Penerimaan masyarakat Jawa terhadap kehadiran masyarakat etnis tersebut ditataran permukaan tidak bermasalah. Masyarakat Jawa di Surakarta berusaha untuk selalu menghormati eksistensi mereka dan menjaga keselarasan hidup bersama melalui konsep kerukunan. Konsep penghormatan dan kerukunan bagi masyarakat Jawa di Surakarta, yang notabene merupakan penduduk lokal setempat, terlihat mudah mereka terapkan sebagaimana tercermin melalui artefak-artefak budaya baik dalam sisi seni, gaya berpakaian, perabot rumah tangga, arsitektur rumah, hingga masalah kuliner. Dapat dicontohkan, di Surakarta muncul makanan-makanan yang berasal dari para pendatang. Seperti Bestik (Eropa), Onde-onde (Tionghoa), gaya berpakaian menggunakan Beskap yang sebenarnya adopsi baju Eropa, kebiasaan masyarakat menggunakan alas duduk karpet dan minyak wangi (Arab), Jamu Sin She (Tionghoa), dan yang lainnya. Kesemua artefak budaya itu ternyata dalam kenyataan sosial masyarakat Surakarta digunakan secara bersama-sama, baik oleh kalangan Jawa dan seluruh etnis yang ada di kota tersebut. Pola-pola tersebut juga tercermin dalam konsep tata kota Surakarta yang begitu mempertimbangkan heterogenitas dari sejak masa kolonial dan masih bisa terlihat sampai saat ini yang membuat klasifikasi-klasifikasi dan pengelompokkan berdasarkan perbedaan latar belakang etnis dan kelas sosial meliputi kompleks rumah tempat tinggal bagi

bangsawan Jawa (golongan tinggi pemerintah pribumi), wakil pemerintahan Belanda (*assistant residence*), kompleks kantor pemerintahan, serta kompleks di sekeliling alun-alun sebagai rumah pegawai negeri Belanda pada baris pertama, pegawai Indo Jawa pada baris kedua, orang-orang Tionghoa pada baris ketiga, dan baris setelahnya atau terluar untuk masyarakat Jawa secara umum golongan kecil dengan ciri pedesaan (Koentjaraningrat, 1994: 230).

Pola pendidikan masyarakat Surakarta dari sejak masa kolonial (1909-1915) masih sangat dipengaruhi oleh pembagian golongan sosial yang berkembang pada saat itu, yaitu pola pendidikan Jawa tradisional dan pola pendidikan Eropa-Belanda. Dalam pola Pendidikan Jawa tradisional, didasarkan pada filosofi “Tut Wuri Handayani”, yaitu secara ideal seorang anak *priyayi* diperbolehkan mengeksplorasi dunianya sendiri dan peran orang tua hanya mendorong kemajuannya dengan tetap menjaga jarak tanpa ikut campur lebih dalam, kecuali si anak berbuat sesuatu hal yang dianggap dapat merugikan keselarasan masyarakat. Sebelum perang dunia II banyak para *bandara* bekerja sebagai pegawai kraton atau sebagai seniman kraton, namun para pegawai pemerintah dan cendekiawan yang berkembang setelahnya juga termasuk dalam kategori *priyayi* (Koentjaraningrat, 1994:234). Sementara dalam pendidikan gaya Eropa-Belanda, membiarkan anak dari para *priyayi* untuk mengeksplorasi dunianya sendiri sembari aktif melakukan pendekatan langsung untuk membimbingnya guna memastikan anak dapat berbuat sesuatu yang disukai masyarakat (Koentjaraningrat, 1994:244). Pola pendidikan tersebut turut andil mempengaruhi perkembangan kebudayaan dalam menentukan arah kehidupan peradaban Jawa (Koentjaraningrat, 1994:245).

Penerimaan masyarakat Jawa di Surakarta untuk dapat membaaur dalam segala potensi selera kultural hakekatnya menjadi wajar saja mengingat konsep dasar etika masyarakat Jawa yang selalu berorientasi untuk mewujudkan keselarasan. Dalam tataran sosial wujud keselarasan tersebut dibangun melalui tindakan hormat kepada orang untuk mewujudkan suatu idealism keadaan sosial yaitu rukun (Frans Magnis Suseno, 1991: 104). Secara batiniah lahirnya konsep keselarasan melalui penciptaan hubungan sosial rukun dan hormat sebenarnya terkait erat dengan konsep *ajrih* (takut) yang dipegang oleh masyarakat Jawa.

Konsep ini menekankan pada perasaan individu Jawa dalam hubungannya dalam interaksi sosial. Tuntutan *ajrih* (takut) tersebut akan membuat orang Jawa mengembangkan sikap batin positif maupun negatif dan superioritas maupun inferioritas. Batin positif meliputi tataran yang terendah dimulai dari *remen* (senang) kemudian meningkat menjadi *tresna* (cinta). Sikap batin negatif diawali dari tataran terdangkal berupa *gething* (benci) dan terakhir *sengit* (sangat benci). Sementara rasa superioritas dalam tataran sosial terjadi dimulai dengan yang paling dangkal yaitu *pekewet* (sungkan) hingga dapat menuju tataran tertinggi yaitu *aji* (hormat). Sedangkan inferioritas dimulai dari munculnya rasa *lingsem* (malu) hingga tataran tertinggi yaitu *isin* (sangat malu) (Koentjaraningrat, 1994:252).

Kebiasaan masyarakat Jawa di Surakarta yang terbuka dengan keberagaman, dalam perjalanan sejarahnya melahirkan bentuk-bentuk perilaku pembauran antar kelompok etnis. Pembauran ini yang pada akhirnya menarik perhatian Kuntowijoyo tentang Kota Surakarta yang ia rangkum ke dalam enam bagian. Kuntowijoyo menulis tentang lima ketertarikannya mengapa perlu menulis Kota Solo terutama era 1900-1915, selain karena memang ada ikatan emosionalnya berupa nostalgia terhadap kota ini. Ketertarikan *pertama* karena Surakarta memiliki dua kerajaan yang berbeda karakter orientasi pengembangan. Dua keraton tersebut pada dasarnya sebagai pewaris Kerajaan Mataram Islam, namun dalam dinamika perkembangannya Surakarta mengembangkan diri secara adaptif dan terbuka terhadap pengaruh dari luar. Meskipun demikian ruh dan jati diri kebudayaan Jawa tetap menjadi identitas yang melekat dalam diri masyarakat Surakarta. Pengembangan diri masyarakat Surakarta tercermin secara jelas dari dua kerajaan yang menjadi elemen pijakan masyarakat Surakarta era modern. Keraton Kasunanan Surakarta cenderung mengembangkan citra-citra simbol kebesaran, sedangkan Pura Mangkunegaran lebih pragmatis mengembangkan sisi kekuatan ekonomi. Kedua orientasi tersebut turut mempengaruhi cara pandang masyarakat Surakarta di era modern, khususnya semenjak masa pergerakan nasional hingga masa republik berkembang (Kuntowijoyo, 2006: xi).

Kedua Surakarta adalah kota *literate* dan maju, dibuktikan dengan keberadaan banyak penerbit koran bercorak Jawa, Cina, Belanda, majalah bercorak

Melayu, terdapat perpustakaan, percetakan (Jawa dan Belanda) dan penerbit buku, salah satu tempat gerakan pembaharuan agama Islam berupa sekolah *Mambaul Ulum*, sebagai tempat tinggal Bagoes Arofah seorang penerjemah Al-Quran ke dalam Bahasa Jawa, serta sebagai tempat pengarang-pengarang Jawa modern tinggal. *Ketiga* sebagai tempat persemaian Kebangkitan Nasional dengan para tokoh-tokoh pergerakan dalam berbagai aliran tinggal di Solo seperti: dr. Radjiman Widiodipuro, dr. Cipto Mangoenkoesoemoe yang anti ‘feodalisme dan kolonialisme’, bahkan tokoh-tokoh radikal SI seperti Haji Samanhoedi, tempat kantor CSI yang pertama, dan tempat bagi orang-orang Eropa-Belanda garis keras yang menolak cita-cita *Onafhankelijkheid* dari *Indische Partij* (Kuntowijoyo, 2006: xi).

Keempat karena pada kurun 1900-1914 juga muncul jargon “kemajuan” (*unities of discourse*) yang menggerakkan orang Jawa dan Cina untuk mewujudkannya walaupun raja Sunan Pakubuwono di Solo bersikeras mempertahankan karakter konservatif hingga 1914. Gerakan “kemajuan” yang dilakukan orang Jawa bersama Cina ditandai dengan simbolisme mereka mencukur rambut yang sebelumnya (secara tradisi) digelung atau dikepang bagi orang Jawa dan dikucir bagi orang Cina, menggunakan pakaian baru campuran (Jawa-Eropa) berupa jas, iket dan alas kaki *cripu* pada acara formal, mengganti konsep berfikir tradisi tentang “*gugon tuhon*” (takhayul) dengan “ilmu kodrat” (ilmu alam). *Kelima* bahwa Solo pada 1900-1914 sudah menjadi kota multirasial, multicultural, dan pluralism kepercayaan. Multirasial karena terlihat di Solo bertumbuh banyak kesenian, kemajuan teknologi, dan layanan-layanan. Dalam kesenian ada sandiwara Barat, komedi stambul, sirkus, wayang orang, wiring, wayang potehi, tayub, pasar malam, dan bioskop. Kemajuan teknologi ditandai dengan berdirinya pabrik es, sumur pompa, bengkel trem, trem kota, listrik, otomobil, uji coba pesawat terbang, dokter, listrik, tukang gigi, penginapan, asuransi, restoran, tukang cukur, bengkel sepatu kuda, toto, dan pelelang. Pluralisme yang terlihat di Solo seperti munculnya kepercayaan: Islam, Kristen, Katolik, Vrijmetselarij, dan teosofi. *Kenam* Solo sangat politis dan radikal sehingga tidak heran muncul Revolusi Sosial yang

merontokan dua kerajaan Jawa di sana sesudah Proklamasi Kemerdekaan (Kuntowijoyo, 2006: xi).



BAB V. LUARAN PENELITIAN

A. Model Rancangan Festival Moderasi

Model umumnya merupakan representasi dari suatu objek, benda, atau ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi-informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi-informasi yang dianggap penting untuk ditelaah. (Achmad, 2008: 1). Model juga dapat diartikan sebagai "proyeksi" yang menyiratkan suatu abstraksi sebagai wakil atau representasi dari suatu realitas yang asli (Kühne, 2004: 2). Di dalam paradigma penciptaan musik, wujud model merupakan perspektif orisinal dari bentuk atau konstruksi musikal dalam imajinasi komponis yang hendak digarap dan diwujudkan menjadi musik (Sunarto, 2020: 105). Berdasarkan pemahaman tersebut, maka hasil luaran penelitian berupa model rancangan festival moderasi merupakan proyeksi yang menggambarkan suatu sistem yang berisi bangunan struktur festival berikut fenomena maupun maknanya.

Model rancangan festival yang digagas dari luaran penelitian ini diberi judul; "FESTIVAL MODERASI" dengan mengusung tema "*Mad-sinamadan, Daya-dinayan*". Kata moderasi merujuk pada kata moderation, yang berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan, atau penghindaran keekstreman baik dalam kehidupan beragama, suku, dan ras. Sedangkan kata 'Mad-sinamadan, daya-dinayan' sebagai tema dari festival ini diangkat dari konsep lokal yang lahir dari masyarakat Nusantara di kebudayaan Jawa. Konsep ini merupakan sebuah pandangan hidup yang mengajarkan tentang pentingnya saling melihat untuk memahami perbedaan di tengah masyarakat (Mad-sinamadan) dan menyadari masing-masing potensi yang berbeda untuk disatukan menjadi kekuatan bersama (Daya-dinayan). Dengan demikian judul dan tema festival ini pada dasarnya mengingatkan tentang pentingnya mentalitas moderat bagi bangsa Indonesia yang hidup dalam lingkungan keberagaman melalui penyikapan untuk

saling memandang, memahami, dan menyatukan potensi sebagai modal kekuatan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

B. Tujuan dan Manfaat Festival

Penyelenggaraan Festival Moderasi “*Mad-sinamadan, Daya-dinayan*” bertujuan untuk:

1. Mempergelarkan nilai-nilai dan spirit budaya tenggang rasa serta keselarasan simbolik dalam realitas keberagaman melalui bingkai festival.
2. Memanfaatkan festival sebagai media untuk memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai keberagaman untuk saling berkontribusi sesuai dengan posisi dan peran masing-masing dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.
3. Membangun kerjasama dan kolaborasi antar dunia pendidikan, masyarakat dan pemerintah untuk mengkampanyekan moderasi beragama sesuai dengan akar dan ideologi Pancasila.
4. Memperkuat kesadaran bersama untuk menjaga stabilitas dan harmoni sosial antar umat se-agama, antar umat beragama, serta antara umat beragama dengan pemerintah.

C. Sasaran Festival

Sasaran festival ini memiliki fokus untuk bisa melibatkan partisipan dari:

1. Institusi Pendidikan Tinggi berbasis keagamaan, yang meliputi:
 - a. Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah
 - b. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta
 - c. Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon.
 - d. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Bali.
2. Perwakilan organisasi keagamaan dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia.
3. Masyarakat umum sebagai *audiens*.

D. Gagasan Bentuk dan Isi Festival

Festival ini dirancang dalam bentuk rangkaian beberapa kegiatan yang disatukan dalam sebuah judul dan tema besar Festival Moderasi “*Mad sinamadan, Daya dinayan*”. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut, antara lain Simposium dan Seminar Moderasi Beragama, Pergelaran Seni Moderasi, dan Pameran Moderasi.

1. Simposium dan Seminar Moderasi Beragama

Simposium ini menjadi wadah presentasi, diskusi, dan publikasi tentang gagasan dan pemikiran moderasi beragama dari perwakilan institusi pendidikan tinggi keagamaan, organisasi keagamaan dan penganut kepercayaan, tokoh masyarakat, serta pemangku kebijakan dari perwakilan pemerintah.

Kegiatan Simposium dan Seminar Moderasi Beragama ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 28 dan 29 Desember 2022, di gedung Teater Besar Gendhon Humardani ISI Surakarta, yang menghadirkan 5 nararumber dan mencetak proseding.

2. Pagelaran seni Moderasi

Pergelaran ini menjadi ruang presentasi karya seni pertunjukan yang mengekspresikan dan mengkomunikasikan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta spirit kerukunan sebagai modal persatuan dan kesatuan.

Kegiatan pagelaran Seni Moderasi memberi ruang pementasan 4 karya seni pertunjukan yang ditampilkan pada tanggal 28 dan 29 Desember 2022, di gedung Teater Besar Gendhon Humardani ISI Surakarta

3. Pameran Moderasi

Pameran ini menjadi wadah untuk menunjukkan hasil karya rupa, kriya, batik, desain komunikasi visual (komik dan poster), fotografi, film, dan karya jurnalistik. Pameran ini digelar untuk menarasikan wacana moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pameran Moderasi dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 28 – 30 Desember 2022 di gedung Teater Besar Gendhon Humardani ISI Surakarta.

4. Produksi Karya Seni Pertunjukan Moderasi

Pada festival moderasi 2022 ini, ISI Surakarta sebagai tuan rumah juga berencana untuk memproduksi karya seni pertunjukan untuk mengkampanyekan

moderasi beragama sesuai dengan akar dan ideologi Pancasila. Karya seni pertunjukan ini akan dipentaskan pada *Closing Ceremony Festival Moderasi* pada tanggal 30 Desember 2022 di gedung Teater Besar Gendhon Humardani ISI Surakarta.



DAFTAR ACUAN

- Adi, Ayu Fibramantya, Hardiyati, dan Istijabatul Aliyah. "Dinamika Relasi Sosial Dalam Aktivitas Kirab Budaya Grebeg Sudiro". *Cakra Wisata: Jurnal Pariwisata dan Budaya* [Vol 20, No 1 \(2019\)](#)
- Adriana, Tissania Clarasati, 2013, "Tradisi Grebeg Sudiro di Sudiroprajan (Akulturasi Kebudayaan Tionghoa Dengan Kebudayaan Jawa)". *Jurnal Candi, vol 5, no.1. 2013.*
- Arafah, Sitti, 2020, "Moderasi Beragama: Pengarusutamaan Kearifan Lokal dalam Meneguhkan Kepelbagaian (Sebuah Praktik Pada Masyarakat Plural)". *Jurnal Mimikri, Vol. 6, No.1. Juni 2020.*
- Creswell, John W., 2016, *Research Design: Pedekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Book, Inc.
- Hadi, Y. Sumandiyo. 2006. *Seni dalam Ritual Agama*. Yogyakarta: Pustaka.
- Hakim, Latifa Dinar Rahmani. 2020. "Grebeg Sudiro dan Representasi Keberagaman di Sudiroprajan, Kota Surakarta". *Indonesian Journal of Religion Society vol. 2 no. 1 2020.*
- Istiqomah, Anisa dan Widiyanto, Delfiyan. 2020. "Resolusi Konflik Berbasis Budaya Tionghoa-Jawa di Surakarta". *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan vol. 17 no. 1, 2020.*
- Koentjoroningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo. 2004. *Raja, Priyayi, dan Kawula, Surakarta 1900-1915*. Yogyakarta: Ombak.
- Lutan, Rusli. 2001, *Keniscayaan Pluralitas Budaya Daerah: Analisis Dampak Sistem Nilai Budaya Terhadap Eksistensi Bangsa*. Bandung: Angkasa.
- Purbasari, Verbena Ayuningsih, and Suharno Suharno. 2019, "Interaksi sosial etnis cina-jawa kota surakarta." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya Vol 21. No 1 2019.*
- Rustopo, 2007, *Menjadi Jawa: Orang-orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta, 1895-1998*. Yogyakarta/Jakarta: Ombak-Yayasan Nabil.

Stoeltje, Beverly J. 1992, "Festival", dalam *Folklore, Cultural Performances, and Popular Entertainments: A Communications-centered Handbook*, Richard Bauman (ed). New York: Oxford University Press.

Sugiharto, Bambang, 2011, "Kekuatan Seni" dalam *Daya Seni*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

Suryadinata, Leo. 2003, "Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?." *Jurnal Antropologi Indonesia 71* 2003.

Suseno, Frans Magnis. 1991. "Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa". Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Van Peursen, 1988, *Strategi Kebudayaan*, terj. Dick Hartoko. Yogyakarta: Kanisius.

Wahid, Alissa. 2015. "Agama dan Hirarki Nilai dalam Praktik kebangsaan Indonesia". *Agama, Keterbukaan dan Demokrasi*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Kerjasama Yayasan Paramadina dengan The Asia Foundation dan The Ford Foundation.

